

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE

Nurul Annisa¹, Arfianty², Imran Rosadi³

Email: nurulanniisaaa@gmail.com¹, arfiantyarfan@gmail.com^{1,2},
imranrosadi080273@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode
Pos 91131

Abstrak

Nurul Annisa, 2025,. judul penelitian "Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare". Pembimbing I Arfianty, dan Pembimbing II Imran Rosadi, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam meningkatkan jumlah pendapatan melalui retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Parepare sampai dengan Tahun 2023 dianggap belum signifikan mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare, dimana capaiannya hanya berkisar 50,69% di Tahun 2023, dan terakhir di Tahun 2024 baru berkisar 56,67%, sehingga untuk meningkatkan pendapatan tersebut maka langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare yakni dengan menintensifikasikan keberadaan lokasi parkir saat ini dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui penerapan kebijakan pemerintah daerah, dan peningkatan mutu pengelolaan dilapangan serta mengoptimalkan target penerimaan pada setiap lokasi parkir. Langkah Ekstensifikasi adalah hal yang menjadi perlu untuk dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare, melihat bahwa masih banyak lokasi fasilitas umum yang dijadikan sebagai lahan parkir belum menjadi bagian dari penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Retribusi, Parkir

Abstract

Nurul Annisa, 2025,. research title " Optimization of Roadside Parking Levy Management to Support Increased Regional Original Income of Parepare City". Supervisor I Arfianty, and Supervisor II Imran Rosadi, Thesis Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Parepare (UMPAR).

The aim of this research is to determine the form of optimization carried out by the Parking UPTD of the Parepare City Transportation Service in increasing the amount of income through parking fees. This research uses a qualitative method approach. The results obtained from this research explain that the level of parking levy revenue at the Parepare City Transportation Department up to 2023 is considered not to have significantly supported the increase in Parepare City's Original Regional Income (PAD), where the achievement was only around 50.69% in 2023, and most recently in 2024 it will only be around 56.67%, so to increase this income, steps taken by the Parepare City Transportation Department are by intensifying the location of current parking in order to increase revenue through implementing local government policies, and improving the quality of management in the field as well as optimizing revenue targets at each parking location. The extensification step is something that needs to be carried out by the Parepare City Transportation Service, seeing that there are still many public facility locations that are used as parking lots that have not yet become part of the parking fee receipts at the Parepare City Transportation Service Parking UPTD.



DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

ISSN. 2721-4907

Volume 1, Nomor 1, Februari 2020

Keywords: *Management, Finance, Retribution, Parking*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber PAD yang potensial adalah retribusi parkir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi, termasuk retribusi parkir, sebagai salah satu komponen pendapatan daerah.

Kota Parepare, sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi akibat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang dinamis. Keberadaan Pelabuhan Nusantara Parepare serta lokasinya yang strategis sebagai jalur lintas utama menuju wilayah utara Sulawesi Selatan turut berkontribusi terhadap tingginya mobilitas kendaraan. Berdasarkan data Samsat Polda Sulsel, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Ajatappareng, termasuk Kota Parepare, mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari retribusi parkir di Kota Parepare sangat besar jika dikelola secara optimal.

Namun, meskipun telah didukung dengan berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi dan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lokasi Parkir Tepi Jalan, realisasi penerimaan retribusi parkir masih jauh dari target yang ditetapkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, capaian penerimaan retribusi parkir hanya berkisar 38,89% hingga 43,78% dari target yang ditetapkan. Bahkan, laporan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare mengindikasikan bahwa pencapaian retribusi parkir hanya mencapai sekitar 50% dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya pencapaian retribusi parkir di Kota Parepare antara lain adalah belum adanya regulasi yang jelas mengenai standar besaran retribusi parkir, kurangnya kajian terhadap tarif parkir yang optimal, serta tingkat kepatuhan pengguna dan pengelola parkir yang masih rendah dalam penggunaan karcis resmi. Selain itu, masih ditemukan praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Belum optimalnya eksplorasi titik parkir potensial dan penggunaan sistem pembayaran yang masih konvensional juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan retribusi parkir.

Optimalisasi pengelolaan retribusi parkir menjadi solusi yang perlu diterapkan guna meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PAD Kota Parepare. Optimalisasi ini mencakup berbagai strategi, seperti penyesuaian tarif parkir berbasis kajian ekonomi, penerapan sistem pembayaran digital, peningkatan pengawasan terhadap pengelola parkir, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dalam pembayaran retribusi parkir. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan PAD Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan retribusi parkir tepi jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. Lokasi penelitian berada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada sistem pengelolaan retribusi parkir yang diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga Mei 2024, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam kebijakan perpajakan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif



kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi optimalisasi pengelolaan retribusi parkir. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis guna memberikan rekomendasi mengenai strategi optimalisasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor parkir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan retribusi parkir tepi jalan di Kota Parepare masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Parepare dari tahun 2019 hingga 2023, pencapaian retribusi parkir rata-rata hanya 54,82% dari target. Tahun 2019 mencatat pencapaian tertinggi sebesar 83,13%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu 42,60%.

Analisis terhadap lokasi parkir tepi jalan menunjukkan bahwa dari 81 titik parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018, hanya 76 titik yang masih aktif beroperasi. Dari titik-titik tersebut, penelitian ini mengidentifikasi 31 lokasi dengan tingkat kepadatan kendaraan tinggi, yang umumnya terkonsentrasi di pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan jalan utama seperti Jl. Bau Massepe, Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Kalimantan, dan Jl. Baso Dg. Patompo. Sementara itu, 45 lokasi lainnya memiliki kepadatan kendaraan yang tergolong sedang, dengan tingkat sirkulasi kendaraan yang lebih rendah.

Selain itu, ditemukan beberapa titik parkir potensial yang belum masuk dalam kebijakan pengelolaan resmi, seperti Pasar Lakessi, Pasar Sumpang, Jalan Mattiro Tasi, dan kawasan kuliner Pasar Senggol, yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melakukan ekstensifikasi lokasi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Parepare meliputi rendahnya kepatuhan terhadap sistem retribusi, lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, dan tidak adanya sistem tarif parkir yang transparan. Wawancara dengan juru parkir menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki standar tarif resmi, sehingga pengguna jasa parkir sering membayar secara sukarela. Selain itu, penggunaan karcis parkir masih minim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah kendaraan yang parkir dan penerimaan retribusi yang diperoleh.

Pembahasan

1. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Parkir

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir, intensifikasi diperlukan dengan cara mengoptimalkan titik parkir yang sudah ada. Berdasarkan temuan penelitian, strategi intensifikasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Penetapan tarif parkir yang jelas sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah agar pengguna jasa parkir tidak membayar secara sukarela.
- b. Penggunaan karcis parkir sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang parkir tercatat dan setoran dari juru parkir sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir.
- c. Peningkatan pengawasan terhadap juru parkir, baik dalam hal kepatuhan terhadap tarif parkir maupun pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pelatihan dan pemberdayaan juru parkir agar memiliki etika pelayanan yang lebih baik, mengingat beberapa pengguna jasa parkir mengeluhkan kurangnya profesionalisme dalam pelayanan parkir.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran parkir, seperti penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS atau aplikasi digital untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan kebocoran retribusi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Selvy (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dari retribusi parkir dapat dicapai melalui penguatan sistem pemungutan,

penerapan kebijakan tarif yang jelas, dan penggunaan sistem digitalisasi dalam pembayaran parkir.

2. Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Parkir

Selain intensifikasi, ekstensifikasi juga diperlukan untuk memperluas basis penerimaan retribusi parkir dengan menambahkan lokasi-lokasi parkir yang belum masuk dalam regulasi resmi. Beberapa titik parkir potensial yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti Jalan Mattiro Tasi, Perumnas Wekke'e, dan kawasan sekitar Pasar Senggol, memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan hari libur.

Strategi ekstensifikasi dapat dilakukan dengan:

- Menetapkan titik parkir baru sebagai bagian dari kebijakan resmi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi.
- Mengatur sistem parkir di lokasi-lokasi strategis, seperti area wisata, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional, untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang parkir berkontribusi terhadap PAD.
- Menyusun regulasi yang lebih fleksibel agar lokasi parkir yang memiliki potensi besar dapat segera dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung studi Riza (2024), yang menekankan bahwa ekstensifikasi lokasi parkir dapat meningkatkan penerimaan retribusi secara signifikan, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan dan pusat-pusat keramaian baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare, khususnya UPTD Parkir, masih belum memberikan hasil yang maksimal. Meskipun telah terjadi peningkatan realisasi penerimaan retribusi parkir dari 50,69% pada tahun 2023 menjadi 56,67% pada tahun 2024, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang lebih efektif melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi parkir.

1. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Parkir

Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan potensi penerimaan dari lokasi parkir yang sudah ada. Hal ini meliputi penerapan kebijakan tarif yang lebih jelas, penguatan pengawasan terhadap juru parkir, penggunaan sistem karcis parkir untuk meningkatkan transparansi, serta digitalisasi sistem pembayaran parkir. Dengan langkah ini, diharapkan penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap PAD Kota Parepare.

2. Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Parkir

Selain intensifikasi, ekstensifikasi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat banyak lokasi parkir potensial yang belum terintegrasi dalam kebijakan resmi pemerintah daerah, seperti area pasar, kawasan wisata, dan pusat keramaian lainnya. Dengan menambahkan titik parkir baru dan mengelolanya secara resmi, potensi penerimaan dari sektor ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk meningkatkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan Legalitas Juru Parkir

Dinas Perhubungan perlu melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir dan memberikan legitimasi atau sertifikasi resmi agar mereka merasa dilibatkan sebagai bagian dari program pemerintah. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku.

2. Pemetaan Sistematis Potensi Lokasi Parkir

Perlu dilakukan analisis yang lebih sistematis terhadap setiap titik parkir, termasuk tingkat kepadatan kendaraan dan estimasi pendapatan yang dapat

dihasilkan. Dengan cara ini, target yang diberikan kepada juru parkir dapat lebih proporsional dan adil, sehingga tidak membebani mereka, tetapi tetap mengoptimalkan penerimaan bagi pemerintah daerah.

3. Penerapan Sistem Pembayaran Digital

Untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran pendapatan, disarankan agar Dinas Perhubungan menerapkan sistem pembayaran parkir digital, seperti penggunaan QRIS atau aplikasi e-parking. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang lebih modern dan akuntabel.

4. Pengawasan dan Penegakan Kebijakan

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik pungutan liar di sektor parkir serta memastikan bahwa tarif yang diberlakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penegakan kebijakan yang lebih ketat dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah petugas lapangan serta memberlakukan sanksi bagi juru parkir yang tidak mematuhi aturan.

5. Penyuluhan dan Pelatihan bagi Juru Parkir

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Dinas Perhubungan dapat mengadakan pelatihan bagi juru parkir, terutama dalam hal etika pelayanan, sistem penarikan retribusi, dan penggunaan sistem pembayaran digital. Hal ini dapat meningkatkan profesionalisme juru parkir sekaligus mengurangi keluhan dari masyarakat pengguna parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. Muhammad 2022. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 13 Nomor (1), Hal : 99–103
- Alek Kurniawan, Bahrullah Akbar, Marja Sinurat, Meltarini. 2024. Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis Di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Vol 8, No 1 (2024): Maret, 962-969
- Anna A.N.S, Bambang Irawan. 2024. Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan MIDA : Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi Volume 21 Nomor 1, Januari 2024
- Annisa Putri, Anzu Elvia Zahara, Ogi Saputra. 2024. Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam (JMEBI)* Vol. 01, No. 01 (2024) November 2024, Hal : 1-13
- Arfianty, A., Arodhiskara, Y., Rosadi, I., & Fatimah, F. (2022, August). Good Corporate Governance Principles And Company Value: The Impact Of Financial Performance. In *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*.
- Azis, A. Muslimin H Kara, Muhammad Wahyuddin Abdullah, Amiruddin. 2020. Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Volume 10 Nomor 3, Hal. 525-534.
- Desyadi, Murtir Jeddawi, Muh. Ilham, Faria Ruhana. 2023. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Volume 7, Nomor 1 (2023) : Hal : 277-286
- Dhio N. M. W. 2024. Optimalisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)* <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18809>
- Fitri Yani Jalil, Iqlima Azhar, Mohammad Annas, dkk. 2024. *Dasar-Dasar Perpajakan*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Hamid., ST Harlina,. 2023. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. CV. Sarma Untung Jawa Tengah.
- Harisda, Yusuf , S., & Syukri, F. (2025). The Influence of Financial Performance on Stock Prices in Banking Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange. *Economics*

- and Business Journal (ECBIS), 3(3), 253–266. <https://doi.org/10.47353/ecbis.v3i3.191>
- Herman Jelatu. 2024. Optimalisasi Kinerja Organisasi Sinergi Fasilitas Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Kerja. Purwokerto- Penerbit Amerta Media
- Ilham Nur Rahman & Ade Nurzaman. 2023. Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi Vol. 3, No. 1, Januari 2023 Halaman 73-85
- Indah Tri Madyati HRP, 2023. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan). Skripsi : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Ma'ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani. 2023. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari. Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 5, No. 2, 2023
- Maulana Rizqi R, Imran Ismail, A Rasyid P. 2024. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governancedi Kabupaten Sinjai. Paradigma Journal of Administration, Vol. 2 (2): 47-73, Desember 2024
- Mestria Cicilia Panjaitan. .2023. Optimalisasi Pengelolaan Lahan Parkir Menggunakan Program Integer Metode Branch And Bound Di Mall Plaza Medan Fair. Jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (JURRIMIPA) Vol.2, No.2 Oktober 2023
- Novthalia Moningka, Harijanto Sabijono, Robert Lambey. 2022. Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022, Halaman 949 - 956
- Nuringsih, N., Ifna, N., & Jamaluddin, J. 2023. Analysis of the Concept of Work Productivity in Islamic Economic Perspective. Bulletin of Community Engagement, Vol. 3 No. 2 (2023), Hal : 232-238.
- Nurmayana Siregar. 2022. Optimalisasi Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi. Medan-UMSU Press
- Pahri, 2023. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam). Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare
- Peraturan Daerah Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Prayoga, A. D. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam – UPB
- Riza Phahlevi Marwanto, Rizal Aprianto, Siti Shofiah 2024. Optimalisasi Kinerja Juru Parkir Berorientasi Keselamatan Di Kabupaten Banjarnegara. Communnity Development Journal Vol.5 No. 1 Tahun 2024, Hal. 265-269
- Saleh, H., Rosad, I., Manda, D., Maulana, Z., & Idris, S. 2021. The effect of good governance on financial performance: an empirical study on the siri culture. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 5 (2021) 0795–0806
- Selvy D.P.A.M, I Syafriyani, Andiriyanto. 2024. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Sumenep): Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1, Nomor 1, Februari 2024
- Suhendra, Adi., Djoko Sulistyono, dkk. 2021. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD. Jakarta-Bina Praja Press
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yuliarso; Ahmad Averus Toana. 2024. Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Implementasi Kebijakan Blok (BLUD, Legalitas, Organisasi dan Kolaborasi). Jakarta Selatan-Damera Press
- Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, Febri Yuliani, 2023. Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai. rogram Pascasarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Riau Jurnal Niara Vol. 15, No. 3 Januari 2023, Hal. 424-442.

